



Memahami Praktik Kejahatan Transnasional Penyelundupan Manusia Melalui Rute Kalimantan Barat-Serawak (2017-2023)

Nabila Chaira¹ & Ahmad Khoirul Umam²

^{1,2} Paramadina Graduate School of Diplomacy

ARTICLE INFO:

Paper Type:

Research Paper

Keywords:

Human Security Issue, Penyelundupan Manusia, Kalimantan Barat, Serawak, Liberalisme Interdependensi.

Article History

Received: 7 February 2025

Revised: 8 April 2025

Accepted: 5 June 2025

Available online: 4 July 2025

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis kajian keamanan manusia melalui penyelundupan manusia rute darat wilayah Kalimantan Barat-Serawak. Penelitian ini juga mengeksplorasi strategi dan rute kelompok kejahatan transnasional terorganisir melalui rute darat wilayah Kalimantan Barat-Serawak dan menarik implikasi teoritis dari alasan penyelundupan lebih khususnya manusia terjadi antar Malaysia-Indonesia. Lebih lanjut, tesis ini mengidentifikasi sejauh mana dampak isu penyelundupan manusia antara Indonesia – Malaysia melalui rute wilayah Kalimantan Barat – Entikong berdampak pada isu keamanan manusia. Selain itu, tesis ini juga menganalisa sejauh mana kerja sama Indonesia-Malaysia dalam mempengaruhi penekanan penyelundupan manusia antar kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapat objektifitasnya. Konsep yang digunakan adalah TOC, penyelundupan manusia, Non-traditional security, dan human security. Adapun teori utamanya menggunakan teori liberalism interdependensi. Pembahasan menunjukkan beberapa hasil, pertama terdapat beberapa masalah dalam isu keamanan di wilayah perbatasan darat antara Kalimantan Barat – Serawak yang menyebabkan masalah penyelundupan manusia di Kalimantan Barat-Serawak melalui rute darat terus terjadi. Kedua, ditemukan isu keamanan manusia yang lebih lanjut di kawasan perbatasan untuk dikaji lebih jauh. Ketiga, faktor internal dan eksternal yang terjalin. Yang terakhir, diperlukan peningkatan kerja sama antar Indonesia – Malaysia dengan fokus untuk memberantas penyelundupan manusia.

*Corresponding author: nabilachaira.21@gmail.com

Cite this article as: Chaira, N. dan Umam, A. K. (2025) *Memahami Praktik Kejahatan Transnasional Penyelundupan Manusia Melalui Rute Kalimantan Barat-Serawak (2017-2023)*. Paramadina Journal of Diplomacy & Foreign Policy, 02 (01), 25-38.

<https://journal.paramadina.ac.id/index.php/diplomacyforeignpolicy>

1. Pendahuluan

Dalam hal ini penyelundupan manusia erat kaitannya dengan perdagangan manusia. Diketahui penyelundupan manusia merupakan bagian dari modus operandi perdagangan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, perdagangan manusia dan penyelundupan manusia ini menjadi dua diskursus yang berbeda karena perkembangannya. Dalam hal ini penelitian ini akan

menjelaskan lebih lanjut terkait perkembangan penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia merupakan modus kejahatan transnasional terorganisir yang paling rawan terjadi di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. Dalam hal ini, panjang perbatasan darat Kalimantan Barat-Serawak mencapai 977 KM (BNPP, 2024).

Kalimantan Barat sendiri diketahui sebagai wilayah nomor 3 terbesar tindak pidana perdagangan orang yang mana migran ilegal masuk menjadi bagian didalamnya (POLRI, <https://data.polri.go.id/id/about>, 29/07/2024). Padahal diketahui sudah ada 4 PLBN resmi di Kalimantan Barat menuju Malaysia yaitu PLBN Entikong-Tebedu, PLBN Aruk-Biawak, PLBN Badau-Lubok Antu, dan PLBN Jagoi Babang-Serikin.

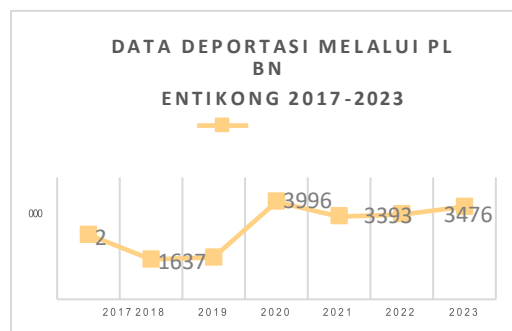
Sebagai warga lokal, penulis banyak menemui korban penyelundupan ilegal melalui perbatasan darat rute Kalimantan Barat - Malaysia ini. Penyelundupan yang awalnya dilakukan secara sukarela oleh warga ini tak jarang berubah menjadi eksploitasi pekerja atau perbudakan karena satu dan lain hal. Kemudian para pekerja ilegal ini berujung pada masalah kejiwaan saat tiba dari deportasi dan repatriasi. Yang mana dalam penelitian ini ditemukan pola berulang yang tetap dilakukan korban atas kemauannya sendiri meski mengetahui kondisi tersebut. Hal ini menjadi suatu isu yang layak untuk dikaji lebih lanjut.

Kemudian masalah selanjutnya adalah penyelundupan manusia masih sering disamakan dengan perdagangan manusia, sehingga penelitian terkait diskursus penyelundupan manusia masih sangat kurang di eksplor (Missbach 2022). Hal ini membuat hukuman terkait penyelundupan manusia masih terdapat kekurangan, yang akan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa kasus TPPO dan PMI Ilegal masih berada dalam satu data yang sama di kepolisian di bawah data TPPO (AKP Anita Sitorus S.H, M.H, Pontianak, Wawancara, 17 Januari 2024). Penelitian ini akan membahas terkait penyelundupan manusia, namun pernyataan yang keluar akan akan banyak menggunakan pribahasa data TPPO dikarenakan alasan tersebut.

Banyak kasus yang ditemukan dari tahun 2017-2023 terkait penyelundupan manusia. April 2017 Bareskrim Mabes Polri mengungkap dugaan korban TPPO di wilayah perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau. Sebanyak enam wanita dan satu pria WNI di periksa dan di data Polsek Entikong. Kemudian, 15 Desember 2017 hingga Maret 2018 Polda Kalbar menerima 15 laporan kasus TPPO dan TKI ilegal. Dalam menindak lanjuti laporan tersebut Direktorat

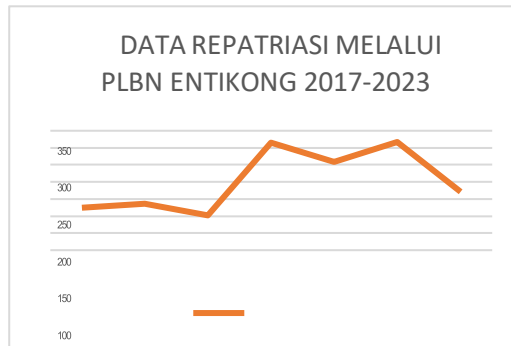
Reserse dan Kriminal Khusus Polda Kalbar berhasil mengungkap 13 kasus. Dari 13 kasus yang terungkap, Polda Kalbar berhasil mengungkap 9 kasus TPPO dan menetapkan 7 orang tersangka. Sisanya merupakan kasus TKI ilegal dengan 60 korban. Sebanyak 20 korban merupakan perempuan. Tujuh di antaranya masih anak-anak dan bayi. Kasus tersebut antar lain terungkap di Pontianak, Sintang dan Melawi, dan sudah di proses hukum (Antara Kalbar, <https://kalbar.antaranews.com/berita/384709/mengungkap-sederet-kasus-perdagangan-orang-dan-tki-ilegal-di-kalimantan-barat>, 17/06/2024). Banyak kasus serupa terus terjadi pada 2020-2023. Tentu kejadian ini mengancam keselamatan warga negara Indonesia yang akan dijadikan sebagai korban TKI Ilegal di Malaysia. Adapun dari data yang didapatkan melalui BNPP, diketahui jumlah antara TKI yang di deportasi dan di repatriasi dari tahun 2017-2023. Data ini secara tidak langsung menunjukkan tingkat migrasi tidak teratur yang terjadi antar Malaysia dan Indonesia. Perhatikan gambar 1.1. dan 1.2. di bawah:

Gambar 1.1. : Data Deportasi Melalui PLBN Entikong 2017-2023



Sumber: BNPP (data diolah penulis)

Gambar 1.2. : Data Repatriasi Melalui
PLBN Entikong 2017-2023



Sumber: BNPP (data diolah penulis)

Dapat di lihat pada gambar 1.1. dan 1.2. di atas, bahwa terjadi peningkatan dalam jumlah PMI yang di deportasi dari 2017 ke 2023. Kemudian untuk jumlah PMI yang di repatriasi juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2017. Repatriasi sendiri adalah program pemulangan kembali PMI dengan biaya full yang diberikan dari pemerintah Malaysia hingga TKI sampai kerumahnya. TKI ini merupakan TKI resmi yang dokumennya lengkap dan sah, namun mengalami kekerasan oleh majikan. Sementara deportasi adalah pengembalian PMI dengan dokumen yang tidak lengkap atau bermasalah (PMI Ilegal), yang tentu tidak dibiayakan oleh pemerintah Malaysia.

Dapat di lihat dari grafik tersebut bahwa perbandingan jumlah antar keduanya sangat jauh. Jumlah PMI yang di deportasi mencapai hingga 20 hingga 30 lipat dari jumlah PMI yang di repatriasi. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Jumlah TKI yang dideportasi tersebut secara tidak langsung menunjukkan banyaknya jumlah penyelundupan manusia yang terjadi menuju Serawak. Hal ini lantaran TKI yang di deportasi merupakan pengembalian TKI dengan dokumen yang tidak lengkap atau bermasalah. Artinya, TKI tersebut lewat menuju perbatasan Malaysia untuk bekerja secara Ilegal. Meski ada kemungkinan TKI tersebut menyelundup sendiri, namun hal ini akan sangat sulit tanpa bantuan dari para penyelundup.

Sementara repatriasi adalah pemulangan WNI yang mendapat perlakuan tidak semestinya. Kekerasan ini pun tidak hanya dapat terjadi dari majikan, namun juga bisa dari corporate.

Atau gajinya tidak dibayarkan. Deportasi dan repatriasi ini dalam sebulan dapat terjadi 4-5 kali, hampir tiap minggu. Patokannya adalah jika penjara di Malaysia penuh, PDRM akan mengirimkan WNI yang sudah dipenjara untuk di deportasi dan memasukkan WNI baru yang tertangkap ke penjara.

Penyelundupan manusia dapat mengakibatkan ke hal berbahaya lainnya yang berdampak pada isu keamanan kemanusiaan. Namun penyelundupan ini masih saja dilakukan dan diminati oleh korban untuk melakukan penyelundupan sebagai migran ilegal. Diketahui sering kali para korban melarikan diri karena disiksa, sehari-hari berada di hutan, sulit membedakan wilayah Indonesia atau Malaysia, padahal sudah bertemu dengan petugas, bahkan ada yang sampai terkena gangguan jiwa (Parulian, Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Entikong, <https://tirta.id/selamat-datang-di-entikong-jalur-padat-perdagangan-manusia-cPYJ>).

Selain itu, belakangan diketahui terdapat fenomena baru yakni penjualan organ tubuh seperti ginjal. Hal ini disampaikan langsung oleh kementerian luar negeri bahwa ada banyak laporan untuk Kementerian Luar Negeri, perwakilan Indonesia di luar negeri dan dari medsos mengenai fenomena tersebut ke Kemenkopolkukam (Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenkopolkukam, Rina P Soemarno, Pontianak, <https://lestari.kompas.com/read/2023/11/21/080000686/darurat-perdagangan-orang-di-kalimantan-barat-kasus-penipuan-online-tinggi>). Bahkan disaat terdapat banyak kasus kekerasan yang ada hingga menimbulkan gangguan jiwa dan kekerasan lain, di Kalimantan Barat ditemukan korban yang kembali bekerja melalui skema ilegal yang ada. Sehingga pertanyaan penelitian yang muncul dalam jurnal ini adalah “Bagaimana faktor pendorong dan faktor penarik penyelundupan manusia di Kalimantan Barat-Serawak?” dan “Bagaimana strategi penanganan penyelundupan manusia di jalur perbatasan darat Indonesia-Malaysia melalui rute Kalimantan Barat-Serawak pada 2017-2023?”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah alat untuk mengeksplor dan memahami suatu individu, kelompok, ataupun masalah manusia (Cresswell, 2007). Peneliti melakukan studi lapangan langsung dan berbicara dengan warga lokal yang sudah sering melakukan kegiatan pulang-pergi melewati perbatasan secara ilegal ini. Adapun instrument kunci dalam tesis ini adalah dengan mewawancarai langsung aktor-aktor yang terlibat. Namun, demi keselamatan, para narasumber meminta untuk dirahasiakan identitas aslinya sehingga akan ditulis dengan anonimitas. Kemudian dilanjutkan dengan mengkaji data yang nantinya dikumpulkan dan disortir melalui buku, dokumen, jurnal maupun website resmi terkait. Adapun 8 responden yang telah diwawancara adalah:

1. Agen X : 12 April 2024
2. Agen : Z : 28 Juni 2024
3. Korban Y : 21 April 2024
4. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat: 17 Januari 2024
5. Kepala BNPP Entikong : 22 Juni 2024
6. Kepala PLBN Badau : 22 Juni 2024
7. BP2MI Pontianak : 13 Februari 2024
8. TNI Wilayah Perbatasan : 14 Juli 2024

3. Teori

Penelitian ini menggunakan teori Liberalisme Interdependensi. Teori liberalisme interdependensi dikembangkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye, Jr pada tahun 1977 dalam bukunya yang berjudul *power and interdependence*. Asumsi teori ini adalah yang pertama, hubungan antar negara saat ini tidak hanya atau bahkan pada dasarnya merupakan hubungan antar pemimpin negara; terdapat hubungan di berbagai tingkatan melalui berbagai aktor dan cabang pemerintahan. Kedua, terdapat sejumlah hubungan transnasional antara individu dan kelompok di luar negara. Selain itu, kekuatan militer merupakan instrumen kebijakan yang kurang berguna dalam kondisi saling ketergantungan yang kompleks. Akibatnya, hubungan internasional menjadi lebih mirip politik dalam negeri: ‘Permasalahan yang berbeda menghasilkan koalisi yang berbeda, baik di dalam pemerintahan maupun antar

pemerintah, dan melibatkan tingkat konflik yang berbeda-beda. Politik tidak berhenti di tepian air’ (Keohane dan Nye, Jr 1977: 25).

Adapun 3 karakteristik utama inter-dependensi kompleks adalah (Keohane dan Nye, Jr 1977) :

- Aktor transnasional semakin penting bagi negara, bukan unit yang koheren;
- Kekuatan militer kurang bermanfaat. Instrumen ekonomi dan kelembagaan lebih bermanfaat;
- Keamanan militer kurang penting. Masalah kesejahteraan semakin penting.

Hal inilah yang menjadikan teori ini cocok dalam mengkaji hubungan internasional dalam isu penyelundupan manusia. Umumnya teori ini digunakan untuk mengkaji bidang ekonomi. Namun, isu keamanan modern (NTS) belakangan juga berkaitan erat dengan penyelundupan manusia karena tujuannya adalah kepentingan ekonomi. Hubungan Indonesia – Malaysia dalam tesis ini merupakan hubungan kerja sama antar kedua negara sehingga lebih cocok dikaji menggunakan teori liberalisme interdependensi.

4. Penyelundupan Manusia di Kalimantan Barat Serawak

Dalam hal ini diketahui dalam masyarakat Internasional, aktor yang menjalin hubungan tidak hanya negara dengan negara lagi seperti dahulu, namun juga melibatkan individu dengan individu. Dengan spektrum yang lebih luas hal ini diakibatkan kemajuan teknologi dan globalisasi. Dari data yang diberikan kepolisian daerah Kalimantan Barat, terdapat peningkatan jumlah tersangka (TSK) dari 2020 ke 2023. Pada 2020 jumlah tersangka yang ditemukan hanya 13 orang, sementara pada 2023 jumlah tersangka yang ditemukan 80 orang. Hal ini menandakan terjadi peningkatan kejahatan penyelundupan manusia di wilayah Kalimantan Barat. Berikut data yang diberikan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

TAHUN	JMLH KASUS	KORAN				TSK	MO US					
		PEREMPUAN		LAKI - LAKI			TKI	PSK	Eksploitasi anak	ABK	ORGAN	JUAL ANAK
		DEWASA	ANAK	DEWASA	ANAK							
2020	10	6	1	31	1	13	10	-	-	-	-	
2021	6	7	3	19	-	10	6	-	-	-	-	
2022	24	50	8	148	1	30	22	-	-	-	-	
2023	67	63	15	189	5	80	54	5	8	-	-	

Dari data di atas, dapat dilihat ketimpangan antara jumlah PMI yang di deportasi dari data yang diberikan oleh BNPP dengan kejahatan kemanusiaan yang berhaslkan digagalkan. Hal ini tentu masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hal ini menandakan rendahnya tingkat keamanan manusia di Indonesia melalui Kalimantan Barat ini. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa hal ini bisa terjadi.

Adapun dari wawancara yang dilakukan dengan agen pelaku penyelundupan, diketahui bahwa mereka bisa menyelundupkan orang hingga kurang lebih 100 orang sehari melalui wilayah Aruk (X, Wawancara, Pontianak, 12/04/2024). Dalam hal ini, pernyataan agen tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu korban penyelundupan yang telah di wawancara melalui rute yang sama yaitu jalur tikus hutan di wilayah Aruk. Miss Y menyatakan bahwa saat ia diselundupkan masuk ke Indonesia, ia berpapasan dengan kurang lebih 30 orang yang melewati jalur yang sama pada siang hari. Menurut miss Y, kemungkinan mereka dapat melewati kurang lebih 100 orang dalam sehari (Y, Wawancara, Pontianak, 21/04/2024).

Tingginya angka deportasi pekerja ilegal di PLBN Entikong ini menunjukkan tingginya isu keamanan manusia di perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia melalui rute Kalimantan Barat - Serawak. Diketahui Indonesia berbatasan langsung dengan negara bagian Malaysia yaitu Serawak. Tingginya jumlah TKI yang di deportasi setiap tahunnya menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat Indonesia dalam mencari pekerjaan ke Malaysia.

Perubahan global menjadi faktor penting dalam munculnya isu keamanan non-tradisional ini. Sebelumnya fokus keamanan internasional berfokus hanya pada negara dan militer sebagai aktor utama dalam hubungan Internasional. Namun dewasa ini terdapat sektor baru yang turut mendominasi memainkan peran penting dan dapat membawa perubahan pada jalannya hubungan internasional, yaitu ekonomi. Perekonomian menjadi hal penting belakangan bagi setiap manusia.

Korban penyelundupan di Kalimantan Barat melalui rute darat ini umumnya banyaknya dikenal dengan orang-orang yang berasal dari luar daerah Kalimantan Barat. Melalui wawancara dengan Kepolisian daerah Kalimantan

Barat dan Kepala BNPP Entikong menyatakan bahwa kebanyakan korban trafficking adalah masyarakat yang berasal dari luar Kalimantan Barat, yakni kebanyakan NTB, NTT, Seluruh Jawa, bahkan DKI Jakarta (Dunan, Wawancara, Pontianak, 22/06/2024). Hal ini menunjukkan bagaimana kondisi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di Indonesia tidak merata, hingga membuat masyarakat bahkan yang dari luar Kalimantan Barat berusaha untuk bekerja di Malaysia melalui rute darat Kalimantan Barat-Serawak ini.

Namun belakangan terjadi perubahan fenomena asal korban. Dulu fenomenanya korban berasal dari daerah Jawa, NTB, NTT. Sekarang fenomenanya terbalik, separuhnya WNI yang berasal dari Kalimantan Barat berasal dari Sambas, Landak, Kubu Raya, Kota Pontianak, Mempawah. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Viktorius Dunand, saat di wawancara. Sekarang jumlah berimbang, antara warga luar Kalimantan Barat dan daerah Kalimantan Barat sendiri. Artinya lapangan kerja di Indonesia kita kurang (Dunand, Wawancara, Pontianak, 22/06/2024).

Di Serawak sendiri, belakangan digegerkan dengan berita penangkapan oknum penjualan organ ilegal. Oknum tersebut diketahui menjual organ kepada seorang wartawan asal Inggris yang menyamar menjadi pembeli. Harga organ yang ditawarkan sebesar 85 ribu euro atau sekitar 466.440 RM. Oknum tersebut mengakui telah menjual 45 organ yang diiklankan melalui laman facebook-nya (Astro Awani, <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/polis-siasat-laporan-penjualan-organ-manusia-haram-di-sarawak-254646>, 29/07/2024).

Hal ini perlu disadari lebih lanjut oleh pemerintah mengingat tindakan tersebut ditemukan di Serawak yang beseberangan dengan Kalimantan Barat. Penyelundupan manusia yang terjadi lebih jauh Ketika pulang berupa jenazah, dapat menjadi salah satu korban dari penjualan organ ilegal yang ada, nyata, dan dekat. Adapaun dalam hal ini, diketahui bahwa setiap bulannya terdapat jenazah yang pulang melalui Entikong tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Berikut saya tampilkan data jenazah dari tahun 2017-2023.

Gambar 3.3 : Jumlah Jenazah yang Melalui Perbatasan Entikong 2017-2023



Sumber : BNPP (Data diolah penulis)

Dari yang sudah saya tanyakan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, hingga saat ini mereka juga belum pernah mendapat info terkait pengambilan organ manusia ini. Padahal faktanya setiap jenazah yang kembali melewati PLBN, harus melewati X-Ray. Namun, pihak PLBN tidak berani untuk menindak lanjuti ini lebih jauh dikarenakan jenazah yang dipulangkan saat melewati PLBN sudah berstatus barang, bukan lagi manusia yang dikemas di dalam peti. Berdasarkan aturan pemerintah, setiap barang yang melewati PLBN bahkan bandar udara sekalipun, yang hendak melintas antar negara ialah berada di bawah pengawasan bea cukai.

Fenomena ini sangat memprihatinkan khususnya bagi human security. Jenazah statusnya dianggap sebagai barang tentu bukan hal yang baik untuk isu kemanusiaan. Terlebih, tidak terdapat dokter atau petugas kesehatan untuk memeriksa lebih lanjut kondisi jenazah yang melewati PLBN. Isu keamanan manusia di perbatasan harus lebih menjadi perhatian pemerintah terutama terkait hal kehidupan dan kematian. Hal ini harus menjadi salah satu kajian yang harus di tindak lanjut dan menjadi pertimbangan kedepannya.

Adapun korban yang terlibat dapat berasal dari dalam daerah (internal) dan luar daerah (eksternal). Sehingga dalam hal ini terdapat 2 skema pengangkutan yang berbeda. Adapun agen pengangkut terdiri atas driver, driver di

Indonesia, oknum di perbatasan Indonesia, oknum di perbatasan Malaysia, dan driver di Malaysia. Tugas agen pengangkut ini adalah membawa korban yang telah membayarkan sejumlah uang untuk sampai dengan selamat ke tempat majikan yang bertujuan untuk bekerja. Berdasarkan riset yang sudah dilakukan terdapat 2 model skema pengangkutan yang terbagi dari korban yang berasal dari luar daerah (eksternal) dan dalam daerah (internal).

Skema Pengangkutan Eksternal



Gambar 3.4 Sumber: diolah oleh penulis

Skema pengangkutan eksternal di mulai dari korban sampai di bandara. Dalam hal ini, korban akan bertemu dengan driver yang sudah standby menunggu korban di bandara. Kemudian para korban akan diantar ke penginapan yang sudah dijadikan basecamp biasa para penyelundup menginap korban. Korban eksternal ini umumnya akan menginap satu malam karena jadwal kedatangan para korban yang berbeda-beda.

Besoknya, para korban akan diantar menuju perbatasan. Di perbatasan para korban akan diantar menemui oknum penyelundup yang akan membantu mereka melewati perbatasan dengan aman dan selamat. Adapun modus penyelundupan dapat melalui PLBN dengan menyuap oknum petugas imigrasi Indonesia dan Malaysia atau petugas keamanan Indonesia dan Malaysia. Adapun harga yang dibayarkan berbeda-beda dan dapat mengalami kenaikan, tergantung

permintaan dari oknum Malaysia-nya (X, Wawancara, Pontianak, 12/04/2024).

Selain itu, dapat pula melalui illegal exit point yg lain seperti jalur tikus atau jalur gajah. Kemudian setelah melewati perbatasan tersebut, agen mengantarkan mereka ke driver Malaysia yang sudah menunggu di seberang perbatasan. Mereka pun diantar dengan selamat hingga tiba di tempat majikan atau bos untuk mereka bekerja.

Gambar 3.5 :
Skema Pengangkutan Internal



Sumber: diolah oleh penulis

Adapun skema pengangkutan korban internal atau yang berasal dari dalam daerah di mulai dari keinginan korban yang ingin dijemput di mana. Umumnya dalam hal ini para korban dijemput di rumah. Kemudian driver mengantarkan para korban langsung ke perbatasan untuk bertemu oknum yang menyelundupkan. Mereka juga dapat memilih untuk melewati legal exit point yaitu PLBN dengan menyuap oknum petugas imigrasi Indonesia dan Malaysia atau oknum petugas keamanan Malaysia dan Indonesia.

Kembali ditegaskan bahwa oknum penyelundupan petugas dalam hal ini tidak hanya petugas Indonesia. Namun juga dari oknum petugas Malaysia. Di mana bahkan penentuan harga yang dibayarkan bergantung pada permintaan dari petugas Malaysia (X, Wawancara, Pontianak, 12/04/2024).

Kemudian dapat pula melalui illegal exit point yg lain seperti jalur tikus atau jalur gajah. Kemudian setelah melewati perbatasan, agen akan mengantarkan mereka ke driver Malaysia yang sudah menunggu di seberang perbatasan. Mereka pun diantar dengan selamat hingga tiba di tempat majikan atau bos untuk mereka bekerja.

Adapun agen pengeksploitas dalam penyelundupan manusia umumnya adalah majikan. Biasanya dalam hal ini, majikan memberi lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Dalam hal ini seperti salah satu cerita dari korban yang telah diwawancarai bahwa dia muslim namun terpaksa memakan non halal karena majikan yang tidak memberinya ruang untuk memasak namun hanya memakan apa yang ada di kedai (Korban Y, Wawancara, Pontianak, 21/04/2024).

Hal tersebut tentu sangat melanggar nilai moral kemanusiaan dan keagamaan. Di mana kita ketahui diantara umat beragama tentu harus saling menghormati satu sama lain. Hal ini menjadi salah satu isu kemanusiaan yang memprihatinkan di mana korban dipaksa untuk memakan daging babi, yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Keamanan manusia mengajarkan kita untuk mendapatkan perlindungan dari gangguan yang tiba-tiba menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari baik di rumah, di tempat kerja, atau di komunitas (UNDP, 1994: 23).

Adapun faktor pendorong dan penarik dalam hal ini terbagi menjadi 4 yaitu, faktor sumber sosial, faktor ekonomi, faktor keamanan, dan faktor sumber daya manusia. Faktor pendorong datang dari dalam Indonesia di mana banyak WNI yang ingin pergi ke Malaysia untuk bekerja, dan faktor penarik datang dari Malaysia yang lebih tertarik untuk mempekerjakan warga negara dari Indonesia. Faktor pendorong dan penarik dalam hal ini menjadi faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Hal ini menjadikan Indonesia dan Malaysia mengalami hubungan interdependensi yang tinggi.

Faktor sosial dari dalam Indonesia sendiri dalam hal ini wilayah Kalimantan Barat, tidak terlepas dari faktor historis yang ada. Hubungan yang terjalin antar masyarakat Kalimantan Barat dan Serawak merupakan ikatan yang memiliki sejarah panjang yang sulit untuk diputus. Tidak hanya budaya dan bahasa yang mirip, ikatan

darah atau keturunan juga hal yang banyak ditemukan antara masyarakat Kalimantan Barat dan Serawak. Sama halnya bagi Malaysia, faktor historis tentang keberadaan masyarakat Indonesia di Malaysia khususnya Serawak tentu bukan suatu hal yang baru. Hubungan baik yang sudah terjalin antara para pendahulu sebelumnya membuat pekerja Indonesia memiliki nama baik di negeri Jirah ini. Di Serawak, pekerja Indonesia dikenal sebagai pekerja yang ulet, rajin, dan tidak banyak tuntutan.

Adapun dari faktor ekonomi, biaya yang dikeluarkan oleh para pekerja nonprosedural lebih murah jika dibandingkan menjadi pekerja resmi dari pemerintah. Selain itu, biaya mereka dapat ditalangkan terlebih dahulu oleh majikannya di Malaysia, yang akan di potong dari gaji mereka. Hal ini menjadi faktor pendorong WNI, melakukan modus penyelundupan ke Serawak. Adapun faktor penarik dari Malaysia, biaya yang dikeluarkan apabila mengambil WNI gelap melewati rute Kalimantan Barat-Serawak lebih murah dikarenakan jarak yang dekat. Selain itu, mereka dapat digaji lebih murah dibanding mempekerjakan warga lokal.

Adapun dari faktor kemanan, faktor pendorong dan penarik dari Indonesia dan Malaysia sendiri adalah kekurangan personel keamanan dalam menjaga perbatasan yang amat panjang. Sehingga banyak rute-rute yang luput dari pengawasan. Selain itu, masih terjadi tindakan korupsi dalam oknum-oknum tertentu yang bekerja di pemerintahan. Hal ini menjadikan terciptanya kesempatan dan bisnis penyelundupan manusia ini.

Terakhir dari faktor sumber daya manusia (SDM) adalah SDM Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Malaysia. Hal ini membuat terciptanya lapangan kerja di sektor buruh kasar di Malaysia menjadi kekurangan orang, yang mana SDM Indonesia dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena terdiri atas pendidikan yang kurang mumpuni. Pernyataan Menteri Sumber Manusia Malaysia, bahwa Malaysia membutuhkan tambahan tenaga kerja asing sebanyak 540.363 orang atau sekitar 27% dari kebutuhan tenaga kerja di negara tersebut untuk mengisi enam sektor lapangan pekerjaan. Ia mengatakan bahwa terjadi kekurangan tenaga kerja pada sektor konstruksi sejumlah 125.032

orang, perkebunan sejumlah 91.701, jasa sejumlah 93.289 orang, pertanian sejumlah 34.393 orang dan PRT asing sejumlah 37.040 orang, sedangkan sektor lainnya adalah pertambangan (V Sivakumar, Menteri Sumber Manusia, <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2023/03/1074376/malaysia-perlu-540363-pekerja-asing-di-6-sektor-pekerjaan>, 29/08/2024). Hal ini membuktikan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan Malaysia berada pada sektor buruh atau pekerja kasar yang hanya membutuhkan kualitas pendidikan yang rendah.

5. Strategi Penanganan Penyelundupan Manusia di Kalimantan Barat-Serawak

Adapun terkait korban penyelundupan manusia, penanganan dari pemerintah Indonesia adalah terhadap korban yang di deportasi dan repatriasi di damping oleh KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) yang berada di Kuching. Pemulangan ini bermula dari WNI/PMI yang bermasalah yang di tahan dalam sekian waktu, umumnya kurang dari satu tahun. Kemudian dikeluarkan dari Detensi Tahanan Imigrasi (DTI) Malaysia untuk dipulangkan kembali melalui perbatasan Tebedu-Entikong Untuk pemulangan WNI/PMI bermasalah, hanya melalui satu pintu yaitu melalui PLBN Entikong.

Dengan pendampingan KJRI, korban yang di deportasi dan repatriasi Kembali dengan selamat di Indonesia melalui Entikong. Korban-korban ini kemudian diinapkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Entikong, sebelum akhirnya diberangkatkan ke daerahnya masing-masing. Untuk biaya memberangkatkan korban deportasi ini sendiri dibayarkan oleh pemerintah Indonesia dengan pendampingan dari BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) (BP2MI, Wawancara, Pontianak, 13/02/2024).

Adapun aturan terkait perlindungan migran illegal ini biasanya masuk ke UU nomor 18 Tahun 2017 terkait Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (TPPMI). Hal ini dikarenakan jika dalam TPPO, biasanya tidak diterima oleh kejaksaan karena harus ada unsur eksploitasi (seperti pekerja seks dan perbudaa-

kan) (BP2MI, Wawancara, Pontianak, 13/02/2024). Hal ini menjadi sebuah pertanyaan lebih lanjut bahwa sejauh mana eksploitasi perbudakan dianggap sebagai penyelundupan manusia.

Kemudian untuk mendapat bantuan terkait pemulangan PMI Ilegal ini, BP2MI meminta ke kepolisian untuk melengkapi laporan kepolisian, surat perintah penahanan (SPHan), surat perintah sidik (SPSidik), dan surat permohonan bantuan pemulangan ke BP2MI untuk dipulangkan ke daerah asal. Jika sudah dilengkapi seperti itu, kemudian korban-korban akan diantarkan ke BP2MI Pontianak. Korban akan dinapkan di shelter BP2MI di Jl. Aliyang khusus untuk penampungan PMI sementara sebelum dipulangkan di daerah asal dengan fasilitas lengkap dan diberikan makan.

Adapun dalam hal ini terdapat penjaga yang standby 24 jam dari BP2MI di shelter tersebut, handphone juga di tahan. Karena sebelumnya pernah terjadi, mereka shareloc ke agen, dan agennya jemput ke sana. Setelah mau pulang baru dikembalikan handphonenya (BP2MI, Wawancara, Pontianak, 13/02/2024). Untuk pemulangan di daerah asal dapat melalui kapal dan pesawat, dan apabila ada anggarannya di antar sampai ke daerah asal mereka.

Adapun dalam hal ini diketahui masih belum ada penanggulangan rehabilitasi terkait. Korban yang tertangkap dan di deportasi dan repatriasi umumnya dimasukkan ke rumah detensi imigrasi (Rudenim), yang kemudian akan langsung disalurkan ke daerahnya masing-masing saat anggarannya turun. Hal ini menyebabkan tidak adanya efek jera bagi korban yang bekerja melalui penyelundupan manusia. Hal ini mengakibatkan terdapat pola berulang yang dilakukan kembali oleh korban-korban yang telah di deportasi ini.

Tidak heran apabila ditemukannya kembali korban yang sama yang sudah di deportasi sebelumnya dari Serawak. Hal ini dikarenakan belum ada Tindakan lebih lanjut dari pemerintah terkait pelaku migran ilegal agar merasa efek jera. Terdapat pula korban-korban yang berusaha kabur dari Rudenim untuk kembali masuk ke Malaysia. Hal ini menjelaskan alasan tingginya angka deportasi yang ditemukan dari Serawak setiap tahunnya.

Adapun penanganan dari Malaysia, diketahui bahwa Malaysia dan Indonesia baru meratifikasi

Undang-Undang perlindungan Migran Indonesia-Malaysia pada tahun 2022 setelah berakhir pada 2016 lalu, sehingga membutuhkan waktu dalam penerapannya (IOM, 2023, <https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>). Dalam hal ini, diketahui bahwa korban deportasi yang telah ditemukan berulang kali kerap diberikan “suntikan” oleh pemerintah Malaysia saat di penjara hingga berakhir sakit jiwa, hilang ingatan, hingga depresi. Meskipun efek suntikan tersebut tidak langsung, dapat berangsur 6 bulan hingga satu tahun baru terdapat efeknya, namun pelan-pelan tapi pasti. (Riyadi, Wawancara, Pontianak, 22/06/2024). Hal ini dikonfirmasi langsung oleh kepala BNPP Entikong, bahwa kerap ditemukan korban deportasi yang mengalami gangguan jiwa dan dirujuk ke rumah sakit jiwa (Dundan, Wawancara, Pontianak, 22/06/2024).

Hal tersebut dapat dilihat sebagai salah satu upaya pemerintah Malaysia dalam menanggulangi migran gelap yang mengulang untuk bekerja di Malaysia yang tak kunjung jera. Dalam hal ini, hal yang dilakukan pemerintah Malaysia merupakan suatu isu kejahatan manusia. Meski bertujuan untuk kepentingan negaranya, namun mereka menyampingkan isu kemanusiaan yang ada. Hal ini pun dapat di lihat sebagai salah satu kegagalan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi keinginan migran gelap yang terjadi.

Menurut penulis, diperlukan pusat rehabilitasi untuk para korban yang di deportasi, yang mana mereka perlu diajarkan dan direhab agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Dalam isu penyelundupan manusia, kesalahan tidak hanya berada di agen, namun juga dari keinginan para korban yang mencari alternatif untuk melalui jalur tidak resmi dengan modus penyelundupan untuk bekerja di negeri Serawak. Untuk itu diperlukan tindakan lebih lanjut dari pemerintah Indonesia untuk merehabilitasi pola pikir para pekerja yang dideportasi ini agar tidak mengulang kesalahan yang sama dan mencegah tindakan terjadinya masalah keajaiban lebih lanjut yang diberikan oleh Malaysia kepada para korban yang melalui modus penyelundupan berulang ini.

Hal ini dilihat menjadi peluang bagi oknum-oknum setempat guna menghasilkan keuntungan

ekonomi bagi mereka. Dalam menangani hal ini, pemerintah melalui pihak keamanan antar kedua negara telah bekerja sama dalam berusaha memberantas penyelundupan di kedua negara ini. Adapun pihak keamanan yang terlibat dalam menangani strategi penyelundupan Malaysia Indonesia melalui rute Kalimantan Barat – Serawak seperti Polisi Diraja Malaysia (PDRM) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Diraja Malaysia (TDRM) – Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Adapun dari wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu TNI yang pernah bertugas di tapal batas antar wilayah Indonesia – Malaysia mengatakan bahwa tugas utama TNI di tapal batas adalah untuk menjaga agar Malaysia tidak menggeser patok batas yang ada dan sudah ditetapkan. Apabila dalam perjalanannya dapat menangkap penyelundupan hanyalah poin tambahan saja (Abu Kai, Wawancara, Pontianak, 14/07/2024). Artinya, belum ada petugas yang benar-benar di tugaskan untuk mencegah atau memberantas penyelundupan manusia.

Adapun system penangkapan penyelundupan melalui jalur ilegal atau jalur tikus dilakukan dengan system “sergap”. Artinya, apabila mendapat informasi atau laporan dari masyarakat bahwa akan terjadi penyelundupan, TNI baru bersiaga dan menyergap di jalur tersebut. Hal ini diketahui karena kurang personil dalam penjagaan. Selain itu, TNI tidak memiliki kapasitas untuk menghukum. Sehingga setelah ditangkap, TNI menyerahkan ke kepolisian dan tindak lanjut diserahkan ke kepolisian (Abu Kai, Wawancara, Pontianak, 14/07/2024).

Untuk kepolisian sendiri, pertemuan diadakan setiap satu tahun sekali, yang mana Kepolisian Indonesia mengundang PDRM untuk datang ke Indonesia. Namun bertukar informasi terus dilakukan antar kedua negara ini. Adapun dalam hal ini, terkait TPPO dan TPPM masih disatukan. Sehingga penanganannya masih dalam satu divisi yaitu TPPO. Adapun satuan kerja sama antar kedua negara dalam divisi kepolisian sedang dicanangkan. Sudah disosialisasikan, namun belum pasti kapan dijalankannya (AKP Happy Margowati Suyono, Wawancara, Pontianak, 26/06/2024).

Artinya, antara Indonesia dan Malaysia masih sama-sama perlu meningkatkan jumlah personil di perbatasan. Kemudian, diperlukan tim khusus

lebih lanjut dalam memberantas penyelundupan. Selain itu, jalur jalan gajah ilegal perlu ditutup atau dibangun pos penjagaan antar Indonesia-Malaysia di wilayah tersebut. Isu keamanan manusia harus disadari menjadi isu yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Adapun dalam bidang diplomasi, terdapat 2 forum yang sudah dibentuk antara Malaysia dan Indonesia. Yang pertama adalah forum terkait keamanan dengan nama General Border Committee Malaysia – Indonesia. Forum ini menjadi cikal bakal kerja sama dan peningkatan keamanan khususnya di wilayah-wilayah perbatasan. Yang kedua adalah Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (KK Sosek Malindo). Proyek ini juga merupakan turunan dari forum GBC Malindo, namun forum ini berfokus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

GBC Malindo merupakan kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam bidang keamanan. Hal ini sesuai dengan pandangan liberal interdependensi sebelumnya bahwa dalam upaya menghindari perang, negara-negara perlu melakukan kerja sama dalam bidang keamanan secara Bersama (Collective security). GBC Malindo merupakan forum lintas sektor yang melaksanakan fungsi teknis dengan melibatkan berbagai unsur seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Tentara, dan institusi lain kedua negara. Model kerja sama ini sesuai dengan pandangan liberal yaitu federasi, seakan-akan satu entitas badan namun hakikatnya tetap berdiri sendiri.

GBC Malindo melangsungkan pertemuan setiap tahunnya. Dalam GBC terakhir pada tahun 2023, Indonesia dan Malaysia sepakat mengaktifkan kembali pos-pos jaga Bersama. Pos-pos jaga Bersama ini berjumlah sebanyak 14 titik dengan 7 pos di wilayah Indonesia, dan

7 pos lainnya di wilayah Malaysia. Namun, dalam keefektifan, hal ini di rasa belum efektif sepenuhnya dalam memberantas penyelundupan manusia di wilayah Kalimantan Barat-Serawak. Mengingat banyaknya jalur ilegal yang ada, ditambah dengan jalur-jalur jalan tikus di sepanjang perbatasan, kekurangan personil tetap menyebabkan penjagaan keamanan tidak maksimal.

Forum Sosek Malindo merupakan sebuah forum dibawah GBC Malindo yang proses pelaksanaannya terdiri atas tingkat daerah

menuju pusat. Dalam hal ini, isu-isu yang dibahas seperti yang dilampirkan di atas. Dalam hal ini, dibawah sosek Malindo telah dibentuk tim teknis pemberantasan dan pencegahan penyelundupan. Tim ini terdiri atas kerja sama lintas sektoral yang melibatkan Bea Cukai, Polri, TNI, Bakamla, BIN, dan Jaksa Agung yang akan ditingkatkan, dan secara rutin operasi untuk menangkak mencegah penyelundupan akan dilakukan (Sekretariat Kabinet, <https://setkab.go.id/seskab-sampaikan-5-langkah-pemerintah-cegah-penyelundupan/>, 19/07/2024). Dalam struktur organisasi, mekanisme sidang seperti berikut:

1. Pertemuan Tim Teknis.
2. Pertemuan Sekretariat Bersama (Sekber)
3. Sidang Sosek Malindo Tingkat Daerah
4. Sidang Sosek Malindo Tingkat Pusat

Isu yang ada dibahas terlebih dahulu oleh tim teknis masing-masing negara. Kemudian dinaikkan dalam pertemuan Sekber. Kemudian, usulan di sidang pada Tingkat Daerah dalam hal ini Kalimantan Barat – Serawak. Setelah itu, baru isu ini dinaikkan pada tingkat pusat (Indonesia-Malaysia).

Proses ini memakan waktu yang cukup Panjang. Namun pemerintah menilai isu lintas batas merupakan isu yang perlu dibahas dengan penuh kehati-hatian. Hal ini dikarenakan, untuk mencapai kesepakatan antar kedua negara, terutama dengan wilayah yang terintegrasi sebagai upaya untuk tidak menimbulkan Tindakan pemaksaan. Adapun sejak terbentuknya kerja sama Sosek Malindo pada tahun 1980 sampai 2003, telah terbentuk 8 (delapan) tim teknis yang sudah melakukan beberapa kali Sidang yang dilakukan setiap tahunnya secara bergiliran baik di Indonesia maupun Malaysia. Tim teknis yang telah terbentuk dalam kerja sama Sosek Malindo adalah sebagai berikut:

1. Tim Teknis Ekonomi
2. Tim Teknis Perhubungan Dan Asuransi
3. Tim Teknis Pariwisata Dan Kebudayaan
4. Tim Teknis Kesehatan
5. Tim Teknis Pemberantasan Dan Pencegahan Penyelundupan
6. Tim Teknis Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
7. Teknis Pembangunan PPLB Dan Kajian Strategis Perbatasan
8. Tim Teknis Karantina

Namun pada dasarnya berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dalam tesis ini, keseluruhan proses diplomasi sangat panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Begitu pula dalam halnya terkait pemberantasan penyelundupan. Konsep yang diajukan pemerintah beserta komitmen yang dicanangkan sudah baik, namun dalam penerapannya hal ini berbanding terbalik dengan keadaan yang ada di lapangan.

Perkembangan Sosek Malindo dari tahun ketahun menunjukkan kemajuan yang berarti. Hal ini dapat dilihat dari semakin luasnya cakupan pembahasan dan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia, meskipun dalam implementasinya masih banyak di temui hambatan yang harus diatasi oleh kedua belah pihak. Peneliti melihat perkembangan globalisasi yang sedang terjadi dan kemajuan dan pergerakan yang ada semakin canggih.

Proses diplomasi yang memakan waktu Panjang dapat menjadi sebuah pemborosan bagi tindakan di lapangan. Kemudian, diplomasi yang ada pada faktanya dari hasil wawancara di lapangan sangat berbeda dalam pemberantasan penyelundupan. Belum ada nya strategi maksimal yang dilakukan dalam menjaga perbatasan secara berkelanjutan dan keseluruhan. Hal ini menjadi suatu tugas besar bagi Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan komitmen secara lebih lanjut dan nyata dalam pemberantasan penyelundupan manusia di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia.

6. Kesimpulan

Asumsi dasar liberalism interdependensi adalah saling ketergantungan secara mutual. Artinya masyarakat dan pemerintah suatu negara dipengaruhi oleh apa yang terjadi di negara lain dan oleh tindakan pihak-pihak di negara lain. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat hubungan transnasional antar negara berarti semakin tinggi pula tingkat saling ketergantungan. Kaum liberal berpendapat bahwa pembagian kerja yang tinggi dalam perekonomian internasional meningkatkan saling ketergantungan antar negara (Jackson dan Sorensen, 2013). Dalam hal ini, diketahui bahwa tingkat hubungan transnasional di Indonesia dan Malaysia melalui PLBN sangat

tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kedatangan dan kepergian WNI yang tercatat melalui PLBN Entikong mencapai 200 ribu jiwa pada umumnya. Adapun Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama pekerja Indonesia.

Dalam hal ini, isu keamanan yang tercipta bukan lagi negara antar negara melainkan individu antar individu, individu antar kelompok, atau kelompok antar kelompok. Hal ini dikarenakan masyarakat yang terlibat jauh lebih luas dan lebih kompleks. Hal ini membuat ketergantungan terjadi lebih kompleks. Adapun dalam konteks isu perbatasan di Kalimantan Barat-Serawak diketahui keamanan negara masih terdapat kekurangan. Dalam hal ini, masih ditemukan praktik korupsi dan kekurangan personel dalam penjagaan keamanan di perbatasan darat Kalimantan Barat-Serawak yang diketahui wilayahnya amat luas.

Kondisi ini sesuai dengan 3 karakteristik liberalism interdependensi (Keohane dan Nye, Jr 1977), yaitu pertama, peran aktor transnasional semakin penting. Dalam hal ini, kebutuhan lapangan kerja yang dibuka oleh para pelaku usaha dan majikan di Malaysia sangat besar akan kebutuhan buruh kasar. Hal ini menjadi pemicu ketergantungan lebih jauh bagi masyarakat Indonesia yang di mana kita ketahui memiliki kualitas pendidikan yang rendah.

Kedua, adalah pasukan keamanan kurang bermanfaat dibandingkan instrumen ekonomi. Dalam hal ini, kekuatan militer yang ada di Kalimantan Barat-Serawak tidak bekerja secara maksimal jika dibandingkan dengan kepentingan ekonomi oknum-oknum tertentu. Hal ini menyebabkan aktivitas penyelundupan manusia dapat berjalan dan terus terjadi di lingkungan perbatasan darat Kalimantan Barat-Serawak.

Yang terakhir adalah keamanan kurang penting jika dibandingkan dengan masalah kesejahteraan. Dalam hal ini, oknum-oknum tertentu memanfaatkan isu kesejahteraan ekonomi sebagai daya tarik kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini juga menjadi pendorong masyarakat kurang mampu untuk melakukan penyelundupan manusia. Hingga mengesampingkan fakta keamanan militer yang ada.

Dalam ketergantungan kompleks, Keohane dan Nye Jr berpendapat bahwa, pertama, hubungan antar negara saat ini tidak hanya atau

bahkan pada dasarnya merupakan hubungan antar pemimpin negara; terdapat hubungan di berbagai tingkatan melalui berbagai aktor dan cabang pemerintahan. Kedua, terdapat sejumlah hubungan transnasional antara individu dan kelompok di luar negara. Selain itu, kekuatan militer merupakan instrumen kebijakan yang kurang berguna dalam kondisi saling ketergantungan yang kompleks. Akibatnya, hubungan internasional menjadi lebih mirip politik dalam negeri: 'Permasalahan yang berbeda menghasilkan koalisi yang berbeda, baik di dalam pemerintahan maupun antar pemerintah, dan melibatkan tingkat konflik yang berbeda-beda. Politik tidak berhenti di tepian air' (Keohane dan Nye, Jr 1977: 25).

Dalam hal ini, kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani isu perbatasan dan penyelundupan manusia juga terbagi dalam koalisi yang berbeda. Sebagai akibat dari permasalahan di perbatasan yang ada, Indonesia dan Malaysia diketahui membentuk kerja sama khusus mengenai isu-isu perbatasan di kedua negara. Hal ini diakibatkan peningkatan rasa kebutuhan dalam masalah-masalah perbatasan yang ada di Kalimantan Barat-Serawak. Adapun berdasar hasil riset ini, terjadi peningkatan rasa saling membutuhkan antara Indonesia dan Malaysia dalam bidang keamanan dan social di perbatasan menyebabkan terjadinya kerja sama regional antar kedua negara yakni GBC Malindo (Collective Security) dan KK Sosek Malindo. Kerja sama ini dipisah yaitu GBC Malindo terkait keamanan dan KK Sosek Malindo terkait isu sosial ekonomi Kalimantan Barat-Serawak.

Penelitian ini berusaha mengungkapkan realitas yang ada terkait kemanusiaan pada hubungan antar negara Malaysia – Indonesia melalui studi kasus Penyelundupan Manusia Di Perbatasan Indonesia – Malaysia Melalui Rute Kalimantan Barat – Serawak 2017 – 2023. Dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa fakta, yaitu:

1. Masih terjadi kegiatan penyelundupan manusia melalui perbatasan darat Kalimantan Barat – Serawak dalam jumlah besar. Bahkan terdapat pola berulang yang dilakukan korban yang sama untuk kembali bekerja di Malaysia meski sudah tertangkap dan di deportasi.

2. Ditemukan tindak kekerasan yang terjadi pada TKI yang di deportasi yang dilakukan oleh pihak Malaysia. Korban kerap mengalami gangguan jiwa, hilang ingatan, hingga depresi. Terdapat pula dugaan spekulatif terjadinya pengambilan organ dari jenazah yang masuk setiap bulannya.
3. Ditemukan pula fakta bahwa jenazah ini dianggap sebagai barang, bukan manusia. Sehingga tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kepulangan jenazah-jenazah ini. Jenazah melewati x-ray dan berada dibawah otoritas bea cukai, bukan karantina kesehatan. Isu kemanusiaan ini adalah realitas isu yang terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia melalui rute Kalimantan Barat-Serawak. Dalam hal ini, tentu tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadi pola yang sama dalam konteks perbatasan darat di daerah lain.
4. Di Indonesia sendiri, penyelundupan manusia atau pekerja migran gelap atau illegal masih berada di bawah satu payung yang sama di kepolisian sehingga data besarnya masuk ke dalam TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Adapun korban tidak mendapat rehabilitasi, sehingga ditemukan beberapa yang kembali melakukan modus penyelundupan untuk bekerja di Malaysia. Hal ini menandakan bahwa komitmen kedua negara masih rendah dalam menjamin hak – hak kehidupan individu jika mengkaji rute perbatasan darat melalui Kalimantan Barat – Serawak merujuk pada teori liberalisme dan konsep keamanan manusia yang ada.
5. Yang terakhir adalah Masih terdapat ambiguitas dalam pengertian “korban” terkait penyelundupan manusia. Hal ini berpengaruh pada fundamental hukuman yang diberikan pada para korban sebelum di deportasi. Diperlukan telaah lebih lanjut dalam menentukan pengertian korban dalam diskursus penyelundupan manusia mengingat perkembangan penyelundupan manusia yang kian berkembang.

Daftar Pustaka

1. Anggara, A. B. (2020). Dua PMI Banyuwangi Alami Gangguan Jiwa Usai Pulang Dari Malaysia. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/24/100254678/dua-pmi-banyuwangi-alami-gangguan-jiwa-usai-pulang-dari-malaysia>
2. Antara Kalbar. (2019). Menguak Sederet Kasus Perdagangan dan TKI Illegal di Kalimantan Barat. <https://kalbar.antaranews.com/berita/384709/menguak-sederet-kasus-perdagangan-orang-dan-tki-ilegal-di-kalimantan-barat>, 17/06/2024.
3. Anuar, A., R., Harun, A. (2019). Malaysia-Indonesia Cross Border Governance: Is There a Trade Off Between Security and Economic Development?. *Journal of International Studies* Vol. 15, 21-34.
4. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (2024). <https://bp2mi.go.id/siaranpers-detail/siaran-pers-mei-herianti-disiksa-keji-kepala-bp2mi-ini-kejahatan-sekaligus-penghinaan-kepada-negara-kita>, 29/08/2024.
5. Cresswell, J. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. London: Sage Publication.
6. Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemerkopolhukam. Rina P. Soemarno, Pontianak, <https://lestari.kompas.com/read/2023/11/21/080000686/darurat-perdagangan-orang-di-kalimantan-barat-kasus-penipuan-online-tinggi>
7. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat BPTD Kelas II Kalimantan Barat. (2024). Laporan Harian Posko Angkutan NATARU 2023/2024. Pontianak: Kementerian Perhubungan.
8. Keohane, Robert O. & Nye, Joseph S. (1977). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Little & Bown & Co.
9. Parulian. (2018) Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Entikong, <https://tirto.id/selamat-datang-di-entikong-jalur-padat-perdagangan-manusia-cPYJ>
10. Wawancara Bersama Agen Penyelundupan: X (Nama Samaran) (12/04/2024).
11. Wawancara Bersama Korban Penyelundupan : Y (Nama Samaran) (21/04/2024).
12. Wawancara Bersama AKP Anita Sitorus S.H.,
13. M.H (17/01/2024).
14. Wawancara Bersama AKP Happy Margowati Suyono S.I.K., M.H (17/01/2024).